

KATA PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



Tanjung Redab, 4 Maret 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

KABUPATEN BERAU
TAHUN 2018

[Signature]

Pembina Utama Muda

06 194501 1 002



KATA PENGANTAR

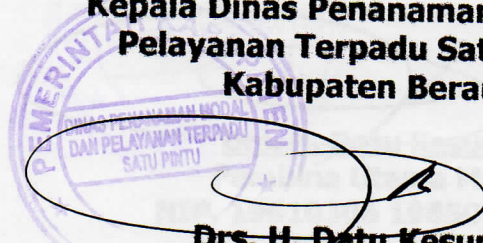
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018 dapat disusun dengan baik. LKj-IP 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan SAKIP yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP).

Tujuan disusunnya LKj-IP agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018 dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Penyusunan LKj-IP 2018 memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkup Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini dibuat dengan harapan semua pihak dapat memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan penyusunan LKj-IP yang lebih baik kedepannya.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Berau**



Drs. H. Datu Kesuma
Pembina Utama Muda
NIP. 19610306 198501 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Berau telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan kepada Inpres Nomor : 7 tahun 1999, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2018.

LKj-IP ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan.

Demikian LKj-IP ini semoga bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai salah satu bahan untuk menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Berau**

Drs. H. Datu Kesuma

Pembina Utama Muda

NIP. 19610306 198501 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pembentukan Organisasi	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Sumber Daya Manusia	6
F. Sarana dan Prasarana	8
G. Sumber Dana	10
H. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	11
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	16
C. Program dan Kegiatan	18
D. Indikator Kinerja Utama	19
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	21
F. Perjanjian Kinerja	23
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	24
B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
D. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun ini	33
E. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	33
F. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	34
G. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Kinerja	34
H. Analisis Asas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35



I. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
J. Realisasi Anggaran.....	36

PENDAHULUAN

BAB. IV PENUTUP	40
------------------------------	-----------

2. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang di bangun diatas pondasi System Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dapat tercapai melalui pemenuhan visi dan misi organisasi sektor publik dapat diukur melalui penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Atas dasar tersebut, Sistem AKIP di bangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan standar yang didapat untuk kemudian mempertanggung jawabkan kinerja yang didapat kepada para stakeholder. Disamping itu, Sistem AKIP juga dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja, yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi pelayanan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau maka perlu terus menerus dilakukan perubahan secara perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi kepada pencapaian hasil.

3. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang di bangun diatas pondasi System Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Atas dasar tersebut, Sistem AKIP di bangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggung jawabkan kinerja yang dicapai kepada para stakeholder. Disamping itu, Sistem AKIP juga dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja, yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi kepada pencapaian hasil.

B. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten



Berau, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau adalah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, tugas pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau adalah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan perijinan administrasi di bidang perijinan terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan sesuai dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumberdaya mineral;



- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

D. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Dalam bab II pasal 3 tersebut diatas menyebutkan bahwa perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
 - Seksi Promosi Penanaman Modal ;
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, membawahi :
 - Seksi Pelayanan I ;
 - Seksi Pelayanan II ;
 - Seksi Penetapan dan Administrasi.
- e. Bidang Data, Pengawasan dan Pengaduan, membawahi :



- Seksi Pelayanan Data dan Sistem Informasi ;
 - Seksi Pengawasan ;
 - Seksi Evaluasi dan Pengaduan.
- h. UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

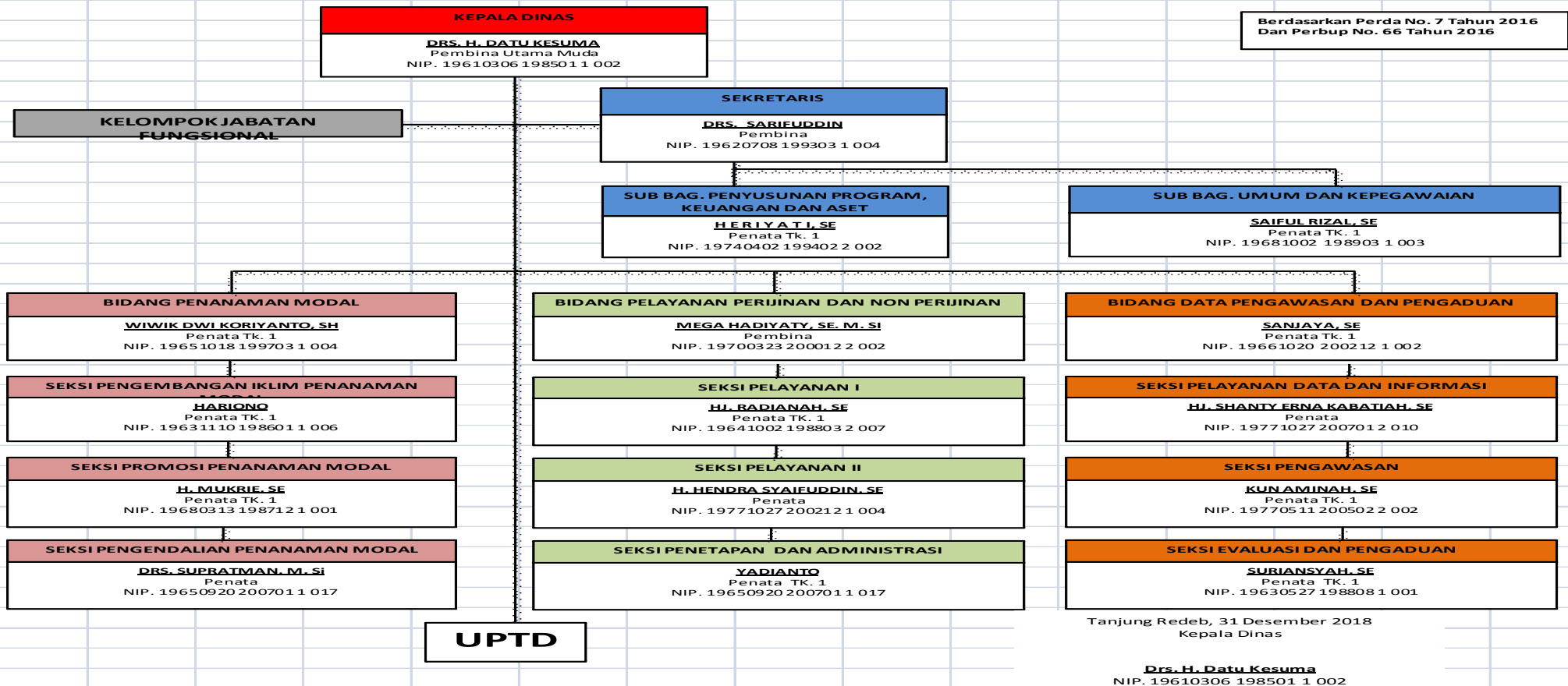


PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Murjani I Telp. 0811590119 Tanjung Redeb, Kode Pos 77311

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BERAU TAHUN 2018

Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2016
 Dan Perbup No. 66 Tahun 2016



Tanjung Redeb, 31 Desember 2018
 Kepala Dinas

Drs. H. Datu Kesuma
 NIP. 196103061985011002



E. Sumberdaya Manusia

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia sejumlah 44 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:
 - a. Laki-Laki : 26 orang
 - b. Perempuan : 18 orang
2. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:
 - a. Sarjana Strata 2 (S2) : 2 orang
 - b. Sarjana Strata 1 (S1/DIV) : 23 orang
 - c. Sarjana Muda/Diploma III : 7 orang
 - d. Sekolah Lanjutan Atas : 12 orang
 - e. Sekolah Lanjutan Pertama : -
 - f. Sekolah Dasar : -
3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan:
 - a. Golongan IV : 3 orang
 - b. Golongan III : 31 orang
 - c. Golongan II : 10 orang
 - d. Golongan I : -
 - e. Non PNS : 13 orang

Adapun rekapitulasi jumlah sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1 : Rekapitulasi Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018

Pangkat / Gol Ruang				PTT	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I		L	P	S2	S1	D3-D2	SLT A	SLT P	SD	
3	31	10	-	13	26	18	2	23	7	12	-	-	44

Sumber: DPMPTSP, 2018.



Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2 : Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2018

NO.	JABATAN	KONDISI AKTUAL	KONDISI IDEAL	KEKURANGAN
1.	Kepala	S1 (Administrasi Negara)	S2 (Managemen)	S3 (Managemen)
2.	Sekretaris	S1 (Ilmu Sosial)	S2 (Manajemen)	
3.	Kabid a. Penanaman Modal b. Pelayanan Pelayanan Perijinan & Non Perijinan c. Data, Pengawasan dan Pengaduan	S1 (Hukum) S2 (Ilmu Ekonomi) S1 (Ilmu Ekonomi)	S2 (Akuntansi) S2 (Administrasi) S2 (Sains)	
4.	Seksi Bidang Penanaman Modal a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal b. Promosi Penanaman Modal c. Pengendalian Penanaman Modal	SLTA S1 (Ekonomi) S2 (Ilmu Ekonomi)	S1 (Mjn.Pemasaran) S1(Eko.Manajemen) S2(Eko.Manajemen)	
5.	Seksi Bidang Perijinan & Non Perijinan a. Pelayanan I b. Pelayanan II c. Penetapan dan Administrasi	S1 (Ekonomi) S1 (Manajemen) SLTA	S1 (Ekonomi) S2 (Ekonomi) S1 (Adminstrasi)	
6.	Seksi Bidang Data, Pengawasan dan Pengaduan a. Pelayanan Data dan Sistem Informasi b. Pengawasan c. Evaluasi dan Pengaduan	S1 (Manajemen) S1 (Manajemen) S1 (Manajemen)	S1 (Tehnologi Informatika) S1 (Manajemen) S1 (Manajemen)	
7.	Sekretariat a. Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset b. Subbag Umum dan Kepegawaian	S1 (Ilmu Ekonomi) S1 (Ilmu Ekonomi)	S2 (Ilmu Ekonomi) S1 (Administrasi)	
8.	Staf	S1, DIII/DII dan SLTA		



F. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan kantor, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga dengan sarana tersebut diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2018 sarana kerja yang dimiliki, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel. 3 : Sarana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	4 unit
2	Kendaraan Roda 2	16 unit
3	Komputer PC	18 unit
4	Printer	24 unit
5	Note Book	9 unit
6	Sound System	1 paket
7	Tanah Bangunan Kantor	1 tempat
8	Genset	1 unit
9	GPS	2 unit
10	Timbangan	1 buah
11	Penyemprot Tangan (Solo)	1 buah
12	Mesin Ketik	7 buah



13	Kalkulator	5 buah
14	Mesin Penghitung Uang	1 unit
15	Felling Kabinet	24 buah
16	Brand Kas	2 buah
17	Lemari Kayu	5 buah
18	Meja Rapat	10 buah
19	Meja Reception	1 buah
20	Kursi Tamu	5 paket
21	Kursi Plastik	50 buah
22	Mesin Potong Rumput	1 buah
23	Lemari Es	3 unit
24	Air Conditioner	18 unit
25	Kipas Angin	5 unit
26	Kompas Gas	1 buah
27	Alat Dapur	1 paket
28	Tabung Gas	1 buah
29	Televisi	5 unit
30	Tustel	1 unit
31	Water Filter	1 buah
32	Tangga Alumunium	1 buah
33	Dispenser	3 buah
34	Handy Came	2 unit
35	Scanner	1 unit
36	Server + Peralatan Jaringan	1 paket



37	Meja Kerja Pejabat	8 buah
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	31 buah
39	Kursi Kerja Pejabat	13 buah
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	56 buah
41	Lemari Arsip	6 buah
42	Camera + Attachment	6 unit
43	Proyektor + Attachment	1 unit
44	Pesawat Telepon (HP)	1 unit
45	Alat Kerja	1 paket
46	Bangunan Gedung Kantor	1 Tempat
47	Kursi Roda	1 buah
48	Jaringan System Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu	1 paket

G. Sumber Dana

Sumber Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2018. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.309.250.000,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.021.669.000,00. Setelah adanya perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 maka Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. 4.781.450.000,00 sedangkan Belanja Langsung setelah perubahan menjadi Rp. 2.280.789.000,00 yang digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.



Tabel. 4 : Rincian Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.800.000,00
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	97.600.000,00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.590.000,00
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.661.000,00
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000,00
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000,00
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	236.200.000,00
14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	68.000.000,00
15.	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	426.200.000,00
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000,00
18.	Konsolidasi Perencanaan Program SKPD	65.300.000,00
19.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	115.000.000,00
20.	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu	120.660.000,00
21.	Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang Pelayanan Umum dan perekonomian (Perijinan dan Non Perijinan)	479.868.000,00
22.	Penertiban dan Pengawasan Pelayanan Perijinan	137.960.000,00
	TOTAL	2.280.789.000,00

H. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Berau



2. Birokrasi prosedur/Undang-Undang/regulasi tentang perizinan dari pusat yang sering diganti serta adanya tumpang tinduh regulasi antar lembaga
3. Masih kurangnya masyarakat untuk mengurus ijin
4. Kurangnya data penanaman modal dan investasi
5. Program dan kegiatan belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal sehingga realisasi tidak maksimal
6. Belum semua investor membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal melalui Kepala DPMPTSP
7. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk periode lima tahun kedepan.

1. Visi

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi



dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 adalah :

**Terwujudnya Pelayanan Perijinan
Yang Profesional Menuju
Peningkatan Investasi Daerah**

Penjelasan dari pokok-pokok Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pelayanan Perijinan : Pelayanan perijinan merupakan hal yang paling signifikan dalam memperlancar arus investasi dan penanaman modal di daerah. Semakin baik kualitas pelayanan perijinan maka akan memberikan efek semakin cepat, efektif, dan efisien proses dan tahapan yang harus dilalui dalam perijinan sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Profesional : Profesionalisme dalam pelayanan perijinan ditunjang oleh banyak faktor antara lain ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dan profesional, kesiapan sistem dan lingkungan di pemerintah Kabupaten Berau serta didukung



oleh sarana dan prasarana yang memadai berbasis teknologi informasi.

Peningkatan Investasi : Investasi atau penanaman modal di daerah
Daerah merupakan salah satu daya dukung penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan kegiatan usaha yang masuk disuatu daerah erat kaitannya dengan pergerakan sumberdaya manusia dimana salah satunya berupa tambahan lapangan pekerjaan ataupun sumberdaya material lainnya yang akan memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu dengan peningkatan investasi daerah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* baik perekonomian Kabupaten Berau dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Misi

Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD. Selain itu misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD.

Untuk mencapai Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 “*Terwujudnya Pelayanan*



Perijinan yang Profesional menuju Peningkatan Investasi Daerah”, maka disusun misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Profesionalisme Aparatur.

B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau beserta indikator dan target yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau memiliki strategi dan kebijakan sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIJINAN YANG PROFESIONAL MENUJU PENINGKATAN INVETASI DAERAH			
MISI 1 : Meningkatkan Investasi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan gairah investasi daerah yang sehat	Meningkatnya pengembangan penanaman modal	Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah	1. Peningkatan pengawasan iklim investasi dan penanaman modal
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Profesionalisme Aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Perbaikan pelaksanaan standar pelayanan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perijinan	



C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau menetapkan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 6
Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja7. Penyediaan Alat Tulis Kantor8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan12. Penyediaan Makanan dan Minuman13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah15. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD



dan Keuangan	2. Konsolidasi Perencanaan Program SKPD
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu 2. Peningkatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan. 3. Penertiban dan Pengawasan Pelayanan Perijinan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BERAU

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
AGENDA II : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berpihak Kepada Rakyat				Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Berau
Tujuan 1 : Meningkatkan gairah investasi daerah yang sehat				
1	Meningkatnya pengembangan penanaman modal	Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah	8.475,2 milyar rupiah	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi (Investor)	4	
AGENDA III : Menciptakan Kabupaten Berau yang aman, demokratis dan damai didukung Pemerintah yang bersih dan Berwibawa dan suasana masyarakat yang kondusif				
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan				
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89 %	Bidang Data, Pengawasan Dan Pengaduan DPMPTSP Kab. Berau

**E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**Tabel. 8 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BERAU**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelancaran kinerja kantor	Jumlah pengadaan materai / perangko dan benda pos lainnya	Eksemplar	6	3	50
		Jumlah sumberdaya air, telpon dan listrik yang tersedia	Sumberdaya	3	3	100
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	Kendaraan	20	18	94,7
		Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang	22	18	81,8
		Jumlah bahan kebersihan kantor	Jenis	350	14	28,0
		Jumlah peralatan yang diperbaiki	Unit	65	15	23,1
		Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	750	77	50,1
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	Cetak/copy	37700	47127	125,0
		Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	60	8	16,0
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	7	4	57,1
		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Buku/eksemplar	1260	550	43,7
		Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Orang	250	200	133,3



		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	Kali	30	25	83,3
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	Kali	80	54	72,0
		Jumlah tenaga jasa administrasi dan teknis perkantoran non pegawai	Orang	13	13	100
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	Gedung	1	1	100
2	Meningkatnya pelaporan realisasi kinerja	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	Dokumen	3	3	100
		Jumlah data laporan perencanaan program	Dok	3	3	100
3	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang terbina	Perusahaan	17	47	313
4	Meningkatnya pelayanan perijinan daerah yang mendukung kegiatan penanaman modal	Jumlah sistem yang terpublikasi ke network tentang pelayanan perijinan	Sistem	1	1	100
		Jumlah ijin laporan layanan perijinan bidang pelayanan umum	Ijin	2650	3252	122,7
		Jumlah titik yang terpantau	Titik	13	30	231

F. PERJANJIAN KINERJA



Keberadaan Perjanjian Kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparat sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja dan evaluasi kinerja aparatur.

Berikut tabel yang merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja DPMPSTP berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel. 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengembangan Penanaman Modal	Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal Daerah	Milyar Rupiah	8.475,2
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88

	<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>
1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1.181.901.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000
4	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100.000.000
5	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	559.768.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Berau Nomor : 700/39/LHE-LKIP/Itkab.Wil-IV/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017. Dari hasil evaluasi Dinas PTSP Kabupaten Berau memperoleh kategori B dengan nilai 69,95 dengan interpretasi Baik dengan sedikit perbaikan, adapun rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja yang telah disusun agar dilakukan monitoring terhadap pencapaiannya yang dituangkan di dalam dokumen pelengkap terhadap dokumen Rencana Aksi, agar Rencana Aksi dapat dimanfaatkan maksimal dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
2. Agar dibuat SOP Mekanisme Pengumpulan Data sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
3. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara periodic (Bulanan/Triwulan/Semester) yang dituangkan di dalam SOP mekanisme pengumpulan data.
4. Mengembangkan teknologi informasi mengenai pengukuran kinerja.
5. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap dokumen IKU yang dituangkan di dalam dokumen pelengkap atas dokumen IKU.
6. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya di dalam laporan kinerja
7. Menyajikan informasi keuangan secara optimal yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja.
8. Menyajikan perbandingan data kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya maupun perbandingan lain yang diperlukan.



9. Melakukan evaluasi rencana aksi, yang disajikan di dalam dokumen pelengkap atas dokumen rencana aksi, dan menyampaikan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata yang disajikan pada dokumen pelengkap atas rencana aksi.
11. Melakukan publikasi atas Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja melalui website pemerintah agar dapat diakses oleh banyak pihak sebagai laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari semua rekomendasi yang telah disampaikan sebagian telah ditindak lanjuti, diharapkan tahun depan ada perubahan dan peningkatan kearah yang lebih baik.

B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Berau Tahun 2018 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi badan seperti yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra). LKj-IP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Berau Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Berau 2016 – 2021 pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, LKj-IP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Berau Tahun 2018 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan



(*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*out-come*), masing – masing sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Berau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. ***Masukan (input)***

adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b. ***Keluaran (Output)***

adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/ non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c. ***Hasil (out-come)***

adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (out-come) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) dari kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa *Formulir Rencana Kinerja Tahunan* dan *Formulir Perjanjian Kinerja*. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan awal tahun Perencanaan Kinerja (*Performance Plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2018 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul dianalisis guna



menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance inprovement*).

Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan kedalam empat kategori sebagai berikut :

Tabel. 10
Kategori Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II.	75 % sampai 100 %	Baik
III.	55 % sampai 75 %	Cukup
IV.	Kurang dari 55 %	Kurang

C. Analisis Capaian kinerja

Sasaran " *Pelayanan Administrasi Perkantoran* " dicapai melalui kegiatan – kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran



Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut :

Tabel. 11
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	Jumlah pengadaan materai / Perangko, benda pos lainnya	Exemplar	6	3	50
	Jumlah sumber daya Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	sumber daya	3	3	100
	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	Unit/Kendaraan	20	18	94,7
	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang	22	18	81,8
	Jumlah bahan kebersihan kantor	Jenis	350	14	28,0
	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Unit	65	15	23,1
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	750	77	50,1
	Jumlah cetakan & penggandaan yang disediakan	Cetak/Copy	37700	47127	125,0
	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	60	8	16,0
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	Jenis	7	4	57,1



	disediakan				
	Jumlah bacaan dan peraturan Per-UUan yang disediakan	Buku/P P/Exemplar	1260	550	43,7
	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Orang	250	200	133,3
	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	Kali	30	25	83,3
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan	Kali	80	54	72,0
	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran non pegawai	Orang	13	13	100

Sasaran " *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur* " dicapai melalui kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut :

Tabel. 12
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	Terlaksananya perawatan secara rutin gedung Kantor	Gedung	1	1	100



Sasaran " *Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* " dicapai melalui kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- Konsolidasi Perencanaan Program SKPD

Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut :

Tabel. 13
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Nilai LKj-IP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	Dok	3	3	100
	Jumlah data laporan perencanaan program	Dok	3	3	100

Sasaran " *Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi* " dicapai melalui kegiatan :

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut :

Tabel. 13
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah Investor berskala nasional yang	Jumlah perusahaan yang terbina	Perusahaan	17	47	276



berinvestasi					

Sasaran " *Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi* " dicapai melalui kegiatan :

- Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Umum dan Perekonomian (Perijinan dan Non Perijinan)
- Penertiban dan pengawasan pelayanan perijinan

Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut :

Tabel. 14
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Nilai realisasi PMDN dan PMA (Milyar Rupiah)	Jumlah sistem yang terpublikasi ke network tentang pelayanan perizinan	Sistem	1	1	100
	Jumlah ijin laporan layanan perijinan bidang pelayanan umum	Izin	2650	3.252	122,7
	Jumlah titik yang terpantau	Titik	13	30	231

Pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan dambaan dan harapan masyarakat. Untuk itu DPMPSTSP Kabupaten Berau melalui perombakan sistem, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka perizinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.



Dari sisi waktu masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perizinan sampai dimana melalui tracking dokumen yang bisa diakses melalui internet. Dari sisi akuntabilitas keuangan, uang yang diterima kasir bisa diakses oleh dinas terkait atau pimpinan lebih tinggi setiap hari (daily report) sehingga sangat akuntabel, daftar selengkapnya sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel. 15
Jumlah Izin dan Retribusi

NO	JENIS PERIZINAN	2017		2018	
		Jml Pemohon	Jumlah Retribusi	Jml Pemohon	Jumlah Retribusi
1	Spanduk, Reklame, Baleho	177	0	108	0
2	IMB	619	1.715.426.500,87	977	1.386.668.751,43
3	SITU	863	1.245.133.050,00	806	1.050.733.500,00
4	IUJK	75	-	84	-
5	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan	26	-	22	-
6	SIUP	557	-	668	-
7	TDP	456	-	528	-
8	TDI	12	-	8	-
9	IUI	2	-	2	-
10	Izin Angkut Sarang Burung Walet	22	-	0	-
11	Izin Jagal	9	-	10	-
12	Pendaftaran Penanaman Modal /Ijin Prinsip Penanaman Modal	28	-	24	-
13	Ijin Usaha Budidaya Perikanan	0	-	8	-
14	Ijin Usaha Angkutan		-	1	-
15	Ijin Usaha Perkebunan		-	5	-
16	Ijin Pembukaan Lahan Perkebunan		-	1	-
	Denda Retribusi (SITU)	0	54.998.110,00		
	Jumlah	2846	3.015.557.660,87	3252	2.496.086.861,43

Dari loket pengaduan yang kami siapkan selama tahun 2018 tidak ada komplain karena kesalahan petugas DPMPSTSP Kab. Berau

D. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja atas indicator kinerja utama bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel. 16

Perbandingan Target Dan Realisasi 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pengembangan penanaman modal	Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah	8.475,2 (Milyar rupiah)	6,765,99	35,13
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi	1	24	600

E. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 17

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2016	2017	2018
1.	Meningkatnya pengembangan penanaman modal	Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah	13,88	38,94	35,13
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi	100	28,00	600
			2	28	24

Ijin lokasi dan lingkungan mulai mempersyaratkan ijin prinsip / pendaftaran penanaman modal di OPD Terkait (Spepise).

F. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Tabel. 18

No	Uraian	Realisasi s/d 2018	Target RPJMD
1.	Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah	35,13	60
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi	600	4

G. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari capaian kinerja tersebut diatas, maka perbaikan dimasa mendatang perlu dilakukan agar visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dapat segera tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan untuk mendapatkan sasaran yang diinginkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisa penyebab keberhasilan

- Konsultasi dengan instansi pusat yang terkait perihal pelaksanaan prosedur/ undang-undang/ regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di daerah.
- Mengadakan sosialisasi mengenai pelayanan perijinan dan melakukan monitoring, evaluasi langsung kelapangan guna menghimbau kepada masyarakat untuk membuat ijin.
- Melakukan koordinasi dengan pihak pengusaha atau instansi terkait guna mendapatkan data penanaman modal.
- Pelaksanaan Program dan kegiatan setiap bulannya guna mencapai target.



2. Analisis penyebab kegagalan

- Birokrasi prosedur / undang-undang / regulasi tentang perizinan dari pusat yang sering diganti serta adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga.
- Masih Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus ijin
- Kurangnya data penanaman modal dan investasi
- Program dan kegiatan belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal sehingga realisasi tidak maksimal.

H. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau pada tahun 2018 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 7.062.239.000 terdiri dari Belanja Langsung 2.280.789.000 terealisasi Rp. 2.209.345.286, untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 4.781.450.000 terealisasi Rp. 4.359.540.969.

I. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau tahun 2018 melaksanakan 5 (lima) Program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

**K. REALISASI ANGGARAN****1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 4.359.540.969,00 atau 91,18% dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp. 4.781.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 19

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tak Langsung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	2.707.450.000,00	2.581.330.969,00	53,99
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2.074.000.000,00	1.778.210.000,00	37,19
	T O T A L	4.781.450.000,00	4.359.540.969,00	91,18

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 2.209.345.286,00 atau 96,87 % dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp 2.280.789.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 20

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00	648.000,00	0,03
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	83.800.000,00	68.316.327,00	3,04



	Sumber Daya Air dan Listrik			
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	97.600.000,00	92.440.866,00	4,05
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.590.000,00	116.655.000,00	5,11
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	4.886.000,00	0,21
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	10.453.475,00	0,46
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	68.114.800,00	2,99
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.661.000,00	63.700.000,00	2,79
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.925.000,00	0,08
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00	16.880.000,00	0,74
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000,00	6.284.500,00	0,28
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000,00	21.960.000,00	0,96
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	236.200.000,00	236.166.944,00	10,35
14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	68.000.000,00	67.991.396,00	2,98
15.	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	426.200.000,00	422.509.530,00	18,52
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	99.079.000,00	4,34
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.770.000,00	0,21
18.	Konsolidasi Perencanaan Program SKPD	65.300.000,00	63.931.948,00	2,80
19.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	115.000.000,00	114.595.000,00	5,02
20.	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu	120.660.000,00	112.241.500,00	4,92
21.	Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang Pelayanan Umum	479.868.000,00	476.896.000,00	20,91
22.	Penerbitan dan Pengawasan Pelayanan Perijinan	137.960.000,00	137.900.000,00	6,05
	TOTAL	2.280.789.000,00	2.209.345.286,00	96,87



3. Hasil Retribusi / Pajak selama Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dalam memberikan Pelayanan Perijinan dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Data, Pengawasan dan Pengaduan, Bidang Perijinan dan Non Perijinan 12 jenis perijinan dan Bidang Penanaman Modal dengan 1 jenis perijinan.

Sepanjang tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau menerbitkan perijinan dan penerimaan retribusi sebagai berikut :

Tabel. 21
Penerbitan ijin dan Penerimaan Retribusi
Tahun 2018

No	Jenis Perizinan	Jumlah Izin	Jumlah Penerimaan Retribusi
1.	Spanduk, Reklame, Baleho	108	0,00
2.	I M B	977	1.386.668.751,43
3.	S I T U	806	1.050.733.500,00
4.	I U J K	84	0,00
5.	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan	22	0,00
6.	S I U P	668	0,00
7.	T D P	528	0,00
8.	TDI	8	0,00
9.	IUI	2	0,00
10.	Ijin Angkut Sarang Burung Walet	0	0,00
11.	Ijin Jagal	10	0,00
12.	Pendaftaran Penanaman Modal/ Ijin Prinsip Penanaman Modal	24	0,00
13.	Ijin Usaha Budidaya Perikanan	8	



14.	Ijin Usaha Angkutan	1	
15.	Ijin Usaha Perkebunan	5	
16.	Ijin Pembukaan Lahan	1	
	Denda Retribusi (SITU)		58.684.610,00
	T o t a l	3252	2.496.086.861,43



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagaimana telah diuraikan di atas, di harapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya sesuai dengan rencana strategis yang telah di tetapkan agar semua kendala dan hambatan yang lalu tidak terulang.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau telah menjalankan tugas sesuai fungsi yang ada sehingga dengan demikian secara umum dapat di simpulkan bahwa keberhasilan yang di dapat selama Tahun 2018 adalah merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat di lihat pemberian Pelayanan Perijinan secara Ramah, Transparan, Cepat, Muda dan pasti yang berimbas pada peningkatan PAD dan retribusi 12 izin yang di kelola.

Sistem pendanaan, ketersediaan dan kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, anggaran yang seimbang adalah merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah di rencanakan.

Demikian laporan ini di buat semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi semacam acuan untuk mencapai target dan kinerja. Jika terdapat kekurangan di mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhirul Kalam kami mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum Wr.Wb.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019

Kepala Dinas

Drs. H. Datu Kesuma

Pembina Utama Muda

NIP. 19610306 198501 1 002